

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Meier (Gemmel; 1994) pembangunan adalah proses yang dapat menciptakan pendapatan riil perkapita sebuah Negara dapat meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat, sejumlah orang hidup dibawah garis kemiskinan mutlak tidak naik dan distribusi pendapatan semakin tidak timpang. Pembangunan ekonomi masyarakat pada hakekatnya merupakan usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Menurut Sjafrizal (2009) ketimpangan pendapatan adalah sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini, dan juga selalu menjadi isu penting untuk ditinjau. Di Negara berkembang masalah ketimpangan telah menjadi pembahasan utama dalam menetapkan kebijakan sejak tahun tujuh puluhan yang lalu. Perhatian ini timbul karena adanya kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan semakin tingginya tingkat kesenjangan yang terjadi.

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, biasanya terjadi pada Negara miskin dan berkembang. Menurut Arsyad (1997), banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit

manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Di negara-negara miskin yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Dengan kata lain, pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahkan, pertumbuhan GNP per kapita di beberapa Negara yang sedang berkembang (seperti India, Pakistan, Kenya) telah menimbulkan penurunan absolut dalam tingkat hidup penduduk miskin baik di perkotaan maupun pedesaan. Apa yang disebut dengan proses “*trickle down effect*” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Kesenjangan pendapatan merupakan ketimpangan relative pendapatan antar golongan masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab ketidakmerataan pendapatan, antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar daerah, perbedaan kondisi geografis antar daerah dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah (Tambunan, 2003:177). Dampak negative dari adanya kesenjangan pendapatan antar daerah yaitu timbulnya rasa kecemburuan sosial. Agar

ketimpangan dan perkembangan suatu daerah dengan daerah lain tidak menciptakan jurang yang semakin besar, maka implikasi kebijaksanaan terhadap daur perkembangan dari pembangunan haruslah dirumuskan secara tepat (Suryana; 2000). Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan harus berjalan berdampingan dan terencana, mengupayakan tercapainya pemerataan kesempatan kerja dan pembagian hasil-hasil pembangunan yang lebih merata.

Beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain : Indeks Gini, Indeks Theil dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Dalam penelitian ini ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Indeks Gini. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu (Widodo, 1990).

Pengeluaran pemerintah merupakan media intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah suatu negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah. Seperti telah diketahui, pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan (Wahyuni, dkk. 2014).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen (Wahyuni, dkk, 2014). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dengan arah yang negatif (Kurniasih, 2013). Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga *output* juga meningkat. Bertambahnya output akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita dan selanjutnya ketimpangan pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui mekanisme pusat pertumbuhan di mana

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat membawa pengaruh bagi daerah lain baik dari sisi positif maupun sisi negatif.

Terdapat sejumlah penelitian berkaitan dengan pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan, yaitu Wahyuni, dkk (2014) menyebutkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2011) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya menurut Susi, dkk (2015) menemukan bukti bahwa Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara dari penelitian Taufik, dkk (2014) investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Wahyuni, dkk (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan periode penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil judul **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014–2016?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014–2016?
3. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014–2016?
4. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014–2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014–2016.
2. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014–2016.
3. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014–2016.

4. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014–2016.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan.
 - b. Sebagai data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
 - c. Sebagai wacana keilmuan bagi pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengetahui Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas pengeluaran pemerintah, struktur APBD, belanja pembangunan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisis tentang desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data berisi hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, keterbatasan, dan saran berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian.